

Press Release**Waspada Api di Pelupuk Mata****20 Juli 2023**

Jakarta – Pantau Gambut menerbitkan kajian terkait kerentanan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) tahun 2023. Kajian ini merupakan sintesis dari rangkaian Kajian Kerentanan Karhutla [jilid 1](#) dan [jilid 2](#) yang diterbitkan sebagai upaya mendorong dan mengevaluasi langkah korektif pada kebijakan dan tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi karhutla. Terlebih lagi, tahun 2023 masuk ke dalam periode siklus anomali iklim El Nino yang menyebabkan Indonesia mengalami kekeringan panjang. Selain melakukan pemeringkatan kerentanan karhutla pada KHG, konsesi, dan provinsi, kajian ini juga melakukan pemantauan titik panas dan prediksi waktu terjadinya musim kemarau yang erat kaitannya dengan bencana karhutla.

Peneliti dan Analis Data Pantau Gambut, Almi Ramadhi, menjelaskan, “Pantau Gambut menjadikan KHG sebagai basis analisis kajian karena pen jagaan dan pemantauan lahan gambut tidak mengenal batas administratif dan harus dalam sebuah kesatuan lanskap atau ekosistem.” Untuk menggambarkan tingkat kerentanan karhutla pada 24,2 juta hektare KHG di Indonesia, Pantau Gambut mengklasifikasikan menjadi tiga kelas kerentanan: kerentanan karhutla kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah. Meski demikian, syarat sebuah wilayah masuk ke dalam kategori rentan karhutla adalah ditemukannya kerentanan kelas tinggi dan sedang pada wilayah tersebut—kerentanan kelas rendah tidak termasuk.

Ancaman karhutla pada KHG tahun 2023 menjadi permasalahan serius karena Pantau Gambut menemukan bahwa 2,5 juta hektare lahan gambut dalam KHG di Indonesia berada pada kerentanan kelas tinggi. Dengan kata lain, kerusakan lahan gambut secara ekstrem yang diikuti oleh pelepasan emisi dan zat-zat kimia ke atmosfer akan membahayakan seluruh tatanan ekologi dan sosial di bumi.

Selama periode 2015–2019, tren ekspansi area produksi korporasi dengan izin HGU dan IUPHHK di lahan yang berstatus Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) lindung pun mengalami peningkatan akibat mudahnya pemerintah menerbitkan izin alih fungsi lahan. Analisis Pantau Gambut menunjukkan adanya Tree Cover Loss (TCL)¹ atau hilangnya vegetasi hijau dominan seluas 421 ribu hektare pada kawasan FEG lindung. Padahal, larangan aktivitas di area lindung juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 3 Tahun 2022 Pasal 17 Ayat 5, yang berbunyi: “HGU tidak berada di kawasan hutan dan kawasan lindung gambut, dari unit kerja kementerian yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan.” Juru Kampanye Pantau Gambut, Wahyu Perdana menambahkan, “Banyaknya vegetasi yang hilang pada FEG lindung menandakan adanya kerusakan ekosistem gambut, sehingga perlu untuk segera dipulihkan.”

Selain aktivitas perusahaan di kawasan gambut lindung, Pantau Gambut juga menemukan hubungan antara kemunculan karhutla dengan area KHG yang dibebani oleh konsesi perusahaan ekstraktif. Berdasarkan histori karhutla pada periode tahun 2015–2020 setidaknya sekitar 30% karhutla terjadi pada area KHG yang dibebani konsesi. Bahkan, pada tahun 2016 dan 2017, karhutla yang terjadi pada area KHG yang dibebani konsesi mencapai angka 50%. Jika ditotalkan seluruh area terbakar pada area

¹ Hansen *et al.* 2013. High-resolution global maps of 21st-century forest cover change. *Science*. 342(6160): 850-853. <https://doi.org/10.1126/science.1244693>.

KHG yang dibebani konsesi, konsesi dengan izin HGU (48%) dan HTI (46%) mendominasi terjadinya karhutla pada area KHG tahun 2015-2020. Berdasarkan analisis Pantau Gambut, dari total 1.764 perusahaan dengan status HGU pada area KHG, 666 perusahaan memiliki area dengan kerentanan karhutla kelas tinggi dan 60 perusahaan lainnya rentan pada kelas sedang dan rendah.

Pulau Kalimantan pun menjadi pulau di Indonesia dengan kerentanan karhutla kelas tinggi terluas akibat dominasi konsesi industri ekstraktif baik HGU ataupun IUPHHK. Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat masing-masing dibebani oleh konsesi HGU seluas 300 ribu hektare. Selain itu, Provinsi Kalimantan Tengah pun juga menjadi provinsi dengan beban IUPHHK terluas dengan luas 145 ribu hektare diikuti oleh Riau (140 ribu hektare) dan Sumatera Selatan (136 ribu hektare).

Luasnya kerentanan karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan sumbangan dari 23,6 ribu hektare area PT Sangkowong Sinta yang menjadi HGU dengan kerentanan kelas tinggi terluas di Indonesia. Sementara pada pemeringkatan perusahaan dengan izin IUPHHK, PT Bumi Mekar Hijau di Provinsi Sumatera Selatan menjadi perusahaan dengan kerentanan kelas tinggi terluas, yaitu seluas 68 ribu hektare. Wahyu menutup, "KHG yang secara historis memiliki catatan pernah terjadi kebakaran dan digunakan sebagai area untuk penggunaan lain seperti konsesi, seharusnya dikembalikan sebagaimana fungsinya sebagai suatu ekosistem gambut yang lestari."

Catatan

Kajian versi lengkap dapat Anda akses melalui tautan bit.ly/KerentananKarhutlaJilid3.

Kontak Media

Jika Anda membutuhkan panduan maupun konsultasi terkait dengan publikasi ini, Anda dapat menghubungi:

Wahyu A Perdana	082112395919	Campaigner Pantau Gambut
Yoga Aprillianno	081390203344	Media Campaigner Pantau Gambut
Website	pantaugambut.id	
Email	ask@pantaugambut.id	
Instagram & Twitter	@pantaugambut	

Tentang Pantau Gambut

Pantau Gambut adalah organisasi non pemerintah yang berjejaring di sembilan provinsi, yang berfokus pada riset serta advokasi dan kampanye untuk perlindungan dan keberlanjutan lahan gambut di Indonesia. Kami juga menyoroti komitmen restorasi gambut oleh pemerintah, organisasi independen, serta pelaku usaha. Pantau Gambut berupaya menyambung pandang mata publik untuk ikut mengamati masalah lingkungan terkait lahan basah ini melalui kanal-kanal komunikasi dan kampanye.